

Isu Kemiskinan dan Karakteristik Masyarakat DIY

ISU kemiskinan menjadi trending topik pembicaraan berbagai kalangan di DIY belakangan ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin DIY sebesar 11,49 persen dan menduduki peringkat pertama di Pulau Jawa. Dengan persentase tersebut terdapat 463,63 ribu orang miskin di DIY.

Data angka-angka statistik itu pun menjadi bahan pembicaraan menarik. Karena banyak pula yang memperbincangkan korelasi antara data angka-angka statistik dengan kondisi riil di masyarakat.

Berbagai upaya terus dilakukan Pemda DIY untuk mengurangi angka kemiskinan. Mulai dari memberikan bantuan tunai, memanfaatkan Dana Keistimewaan (Danais) untuk mengatasi kemiskinan di desa, hingga melibatkan Perguruan Tinggi (PT) dalam Program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Menanggapi seputar isu angka kemiskinan di DIY, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengemukakan, sebenarnya tingkat kemiskinan di DIY tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik semata. Sebab, masyarakat DIY memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri. Misalnya, banyak warga yang memiliki aset seperti hewan ternak dan hasil pertanian, tapi aset-aset tersebut tidak menjadi indikator penghitungan kemiskinan.

"Biaya konsumsi masyarakat DIY juga lebih kecil dibanding daerah lain karena harga makanan yang relatif murah. Hal itu dianggap menjadi masalah secara statistik, karena penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan. Berarti ada sesuatu yang sifatnya anomali, kan gitu. Mungkin pola kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia. Tapi di DIY terjadi anomali seperti itu. Tapi kan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak bisa mengubah hanya untuk DIY (menghitung aset)," ungkap Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (25/1/2023).

Menurut Sultan, sebetulnya DIY sudah berupaya mengatasi kemiskinan dengan memberikan bantuan uang tunai. Namun ketika mendapatkan bantuan tunai, belanja konsumsi masyarakat tidak meningkat. Dampaknya tingkat konsumsi warga tetap berada di bawah garis kemiskinan. "Misalnya untuk biaya konsumsi warga miskin perbulan dihitung Rp 480.000. Untuk mencegah supaya tidak miskin diberi Rp 100.000 dengan

harapan pengeluarannya jadi Rp 580.000. Tapi kalau Rp 100.000 itu tidak dikonsumsi, namun untuk barang lain atau disimpan, ya pengeluarannya tetap kurang meski sudah ditambah Rp 100.000 (masih Rp 480.000 dan masuk kategori miskin)," terang Sultan seraya menambahkan, kemiskinan di DIY secara persentase memang lebih tinggi dari Jawa Tengah. Namun dari sisi jumlah, kemiskinan di Jateng jauh lebih tinggi.

Sultan mengatakan, Pemda DIY juga memanfaatkan Danais untuk mengatasi persoalan kemiskinan di desa-desa. Caranya, masyarakat miskin yang masih dalam usia produktif namun tidak memiliki pekerjaan dapat menggunakan Tanah Kas Desa dengan sistem sewa. Tanah tersebut bisa digunakan untuk bercocok tanam ataupun usaha lainnya, yang biaya sewanya diambilkan dari Danais. "Mau pilihannya bertani, beternak lele, tapi menggunakan Tanah Kas Desa, disewa lewat Danais yang akan kita bagikan perdesa Rp 1 miliar," ujar Sultan.

Sultan menyatakan, dalam mengentaskan kemiskinan pihaknya juga bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan pendampingan kepada warga miskin yang ada di desa agar diberdayakan. Dengan begitu, pengentasan kemiskinan dan pembangunan di desa akan dilakukan bersama Perguruan Tinggi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang terkonsolidasi dengan Program Pemerintah Daerah.

"Saya sudah berkoordinasi dan bicara ke kalurahan maupun kampus, bisa tidak KKN ini jadi pendamping untuk orang miskin maupun penganggur di desa misalnya lewat program pemberdayaan," ungkapnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menekankan pentingnya perbaikan sistematis dalam aspek tata kelola penanggulangan kemiskinan, termasuk tata kelola data. Menurut Margo Yuwono, upaya perbaikan tersebut dibutuhkan guna mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 menjadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen.

"Kalau melihat tren data, data kemiskinan tahun 2022 sebesar 9,5 persen dan kemiskinan ekstrem 2,04 persen. Sependitinya agak sulit untuk mencapai di angka 7 persen maupun 0 persen, tapi kita perlu berupaya melakukan percepatan berupa tata kelola baru agar target persentase kemiskinan



KR-M Nur Hasan

Memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk kegiatan ekonomi produktif, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

maupun kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercapai," ujar Kepala BPS dalam Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Berdasarkan data kondisi kemiskinan ekstrem pada 212 kabupaten/kota prioritas Pemerintah tahun 2022, terjadi penurunan persentase dari 3,61 persen pada Maret 2021 menjadi 2,76 persen pada Maret 2022. Terdapat perubahan kategori dari miskin ekstrem pada periode Maret 2021 menjadi tidak miskin ekstrem pada Maret 2022 sebesar 2,91 persen. Adapun kategori miskin ekstrem yang tetap menjadi miskin ekstrem 0,7 persen, serta tidak miskin ekstrem menjadi miskin ekstrem 2,06 persen.

Margo menyampaikan, kemiskinan itu dinamis sehingga perlu dirancang tata kelola data yang baik melalui pemutakhiran data secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan, agar target mengatasi kemiskinan ekstrem pada 2024 dan sasaraannya menjadi jelas. "Ini perlu dibangun dan menetapkan dengan jelas bahwa siapa yang miskin ekstrem itu, ini harus didefinisikan dengan jelas agar kementerian/lembaga termasuk Pemerintah Daerah mempunyai target yang sama terhadap sasaran yang ingin kita capai," ujar Margo.

Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menyatakan, penghitungan kemiskinan di DIY perlu dilakukan secara objektif dan

multidimensi. Jadi tidak hanya satu aspek saja. Dalam penghitungan kemiskinan di DIY seharusnya tidak hanya berpatokan pada pengeluaran bulanan, tetapi juga memperhatikan hal lain. Untuk menentukan miskin atau tidak, bukan hanya berdasarkan berapa pengeluaran perbulan. Tetapi, yang dimakan apa dan berapa nilainya.

"BPS tidak salah. Karena mereka sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau mau objektif dalam melihat kondisi masyarakat DIY, harus multidimensi. Selama ini BPS tidak pernah menghitung pendapatan perkapita masyarakat. Mereka hanya menghitung pengeluaran perkapita," kata Sekda DIY.

Menurut Baskara Aji, masyarakat DIY memiliki karakter yang khas yaitu gemar berinvestasi dalam bentuk aset. Hal itu membuat ada beberapa data yang tidak masuk dalam penghitungan oleh BPS, sehingga berdampak terhadap hasil data yang menyebut bahwa masyarakat DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.

"DIY pernah membuat intervensi pada masyarakat. Tiap masyarakat miskin kita kasih Rp 1 juta. Tapi tidak ada perkembangan karena Rp 1 juta itu tidak dibelanjakan untuk pemakanan dan nonpemakanan yang dihitung indikatornya oleh BPS. Melainkan dibelikan kambing. Berarti jadi aset. Sementara aset tidak dihitung oleh BPS. Itulah karakter masyarakat di DIY," terang Baskara Aji.

DIY memiliki persentase angka kemiskinan yang tinggi berdasarkan data BPS. Sedangkan angka harapan rata rata lama sekolah, indeks kesejahteraan, indeks kebahagiaan dan harapan hidup tinggi. Hal tersebut merupakan sebuah anomali yang terus terjadi di DIY dimana indikator pembangunan yang cukup tinggi tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi.

Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono mengatakan, persentase penduduk miskin di DIY mencapai 11,49 persen dengan jumlah penduduk miskin 463.630 orang pada September 2022. Capaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata persentase kemiskinan nasional di angka 9,57 persen. Meski demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY sebesar 80,64 pada 2022. IPM DIY masuk kategori sangat tinggi dan tertinggi kedua setelah IPM DKI Jakarta.

"Angka kemiskinan di DIY itu menunjukkan adanya kontradiksi paradoks alias anomali. Ada karakteristik tersendiri yang membedakan DIY dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini bisa dilihat salah satunya jika dibandingkan dengan IPM, secara nasional IPM DIY tertinggi kedua di Indonesia," ungkap Beny Suharsono.

Beny menyampaikan, IPM merupakan indikator resmi yang menggambarkan kualitas hidup manusia, dilihat dari beberapa indikator. Indikator IPM di

antaranya, kesehatan, yang dilihat dari usia harapan hidup DIY mencapai 75,08 tahun dan tertinggi di Indonesia.

Kedua, indikator pendidikan, dilihat dari harapan lama sekolah DIY tertinggi di Tanah Air mencapai 15,65 tahun. Dan yang paling menarik, indikator ekonomi dilihat dari pengeluaran perkapita DIY Rp 14,48 juta, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta yang mencapai Rp 18,92 juta.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Budiharto Setyawan mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY, beberapa hal perlu dilakukan. Antara lain terus menciptakan lapangan kerja baru. BI sangat mendukung kesuksesan DIY dalam menjaga keberlangsungan Proyek Strategis Nasional maupun Proyek Strategis Daerah sehingga dapat menyerap tenaga kerja sekitar-lokal.

Berikutnya mengawal optimalisasi penggunaan Dana Desa, agar memiliki multiplier effect yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami juga sangat mengapresiasi upaya DIY meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023, sehingga tidak lagi menjadi yang terendah di Indonesia. Kenaikan UMP ini penting terutama untuk mengurangi gap pendapatan penduduk DIY dengan penduduk pendatang, sehingga diharapkan dapat memperbaiki gini ratio," imbuhnya.

Paniradya Pati DIY Aris Eko Nugroho menyatakan, penanganan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi fokus perhatian Pemda DIY. Sejumlah upaya terus dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait. Program-program dibuat didasari pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) yang memiliki alokasi tertentu khusus untuk pengentasan kemiskinan, disesuaikan kondisi dan potensi wilayah.

"Sejumlah program seperti Desa Mandiri Budaya, Desa Wisata sebagai rintisan Kalurahan Mandiri Budaya, juga Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) menjadi program yang dibiayai Danais. Program-program seperti Beasiswa bagi Anak, Desa Prima untuk Ibu yang diutamakan kepala keluarga, RTLH per individu maupun RTLH terintegrasi, KUBE, penggunaan Tanah Kas Desa yang diperuntukkan masyarakat kurang mampu, sehingga salah satu kebutuhan papan bisa terpenuhi dengan baik," paparnya. (Riyana Ekawati, Fira Nurfiyani, M Nur Hasan)

WISATA

Mencandai Air 'Grojogan Watu Purbo'



KR-M Nur Hasan

Keindahan Grojogan Watu Purbo jadi 'menu utama'.

MENCANDAI air yang mengalir di sela-sela jutaan bebatuan di antara keindahan alam sekitar Sungai Krasak dan Sungai Bebeng yang berhulu di Gunung Merapi, menjadi aktivitas yang mengasyikkan saat menikmati destinasi wisata Grojogan Watu Purbo.

Sejak sekitar tiga tahun lalu, Grojogan Watu Purbo menjadi salah satu destinasi wisata favorit penggemar sepeda di DIY dan sekitarnya. Kawasan Grojogan Watu Purbo memang menawarkan keindahan alam yang cukup lengkap. Di kejauhan tampak gagah perkasa Gunung Merapi yang tinggi menjulang dengan puncaknya yang merekah. Sementara sejauh mata memandang, terhampar hijau sawah dengan tanaman padi dan kebun salak pondoh maupun beragam flora lainnya di sekitar aliran sungai tersebut.

Dan yang paling memesonakan tentu saja daya tarik utama Grojogan Watu Purbo yang menyerupai bentangan tangga raksasa terdiri enam tingkatan dengan air mengalir terus-menerus.

Grojogan Watu Purbo sebenarnya merupakan infrastruktur yang dibangun Pemerintah untuk mengatasi dampak erupsi Gunung Merapi. Grojogan Watu Purbo merupakan sebuah bendungan (dam) yang

dibangun di aliran Sungai Krasak dan Sungai Bebeng pada tahun 1975 atas prakarsa Balai Besar Wilayah Sungai berupa Sabo Dam sebagai kantong lahar untuk menampung material vulkanik Gunung Merapi. Tujuannya, supaya dampak aliran material dari aktivitas vulkanik Merapi tidak membahayakan warga di sepanjang Sungai Krasak dan Sungai Bebeng.



KR-M Nur Hasan

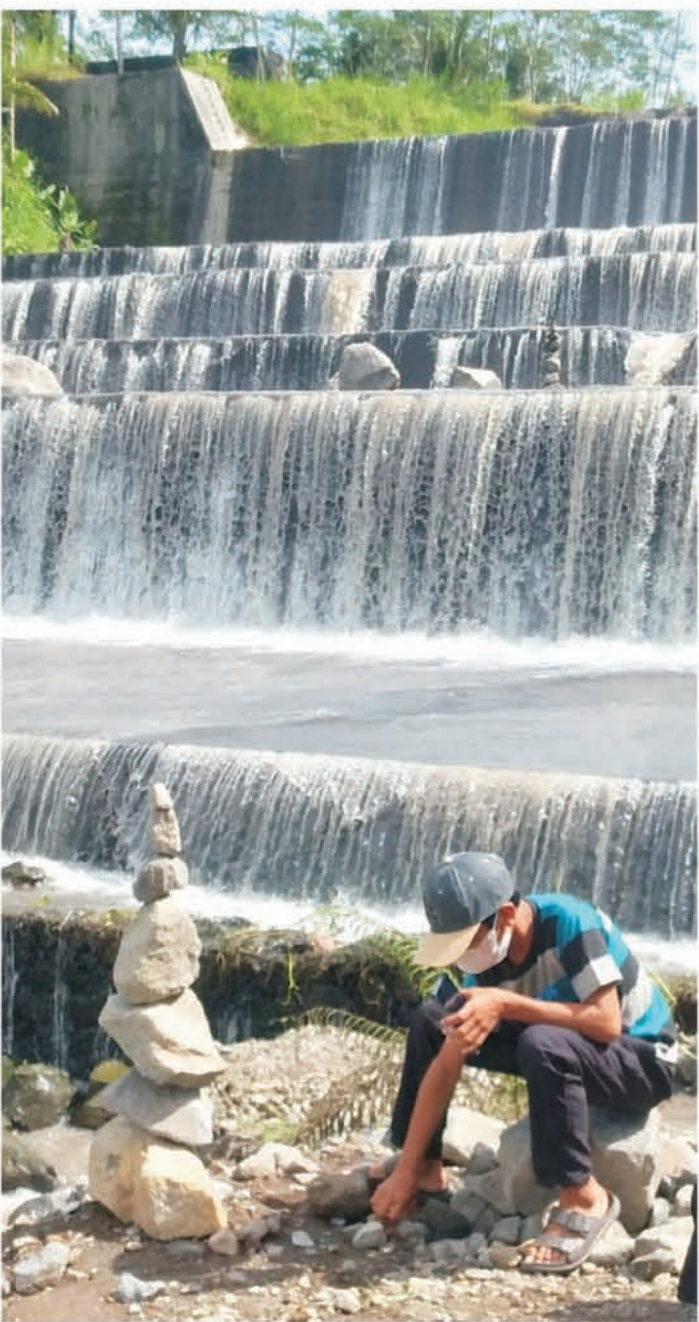
Gunung Merapi di kejauhan.

Menurut penuturan petugas jaga parkir dan pemilik warung di sekitar Grojogan Watu Purbo, warga Padukuhan Bangunrejo, Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Di Yogyakarta. Lokasinya mudah dijangkau dengan beragam kendaraan. Rutenya bisa melewati Simpang Empat Tempel Jalan Magelang (sebelum Jembatan Krasak di perbatasan DIY-Jawa Tengah dari arah Yogya), belok ke kanan (Utara) mengikuti jalan beraspal menuju arah Merdikorejo. Sampai di Padukuhan Bangunrejo, sudah ada papan penunjuk arah ke Grojogan Watu Purbo di sisi kiri jalan.

Mengingat jalan menuju lokasi wisata ini merupakan jalur lalu lintas truk pengangkut material tambang galian C pasir dan batu, wisatawan harus hati-hati di jalan. Apalagi di beberapa titik, kondisi jalan sedikit bergelombang.

Rekreasi menikmati keindahan Grojogan Watu Purbo merupakan aktivitas wisata yang murah meriah. Bagaimana tidak, cukup hanya membayar tiket masuk Rp 3.000 perorang, wisatawan sudah dapat menikmati keindahan alam yang cukup lengkap. Wisatawan terutama anak-anak dapat bercanda, bersenda gurau dan bermain air sepuasnya di aliran sungai di antara bebatuan yang terhampar. Yang menyukai hobi menyusun aneka jenis dan bentuk batu atau 'rock balancing' bisa mengekspresikan dan menunjukkan kepiawaiannya dengan leluasa. Cukup banyak karya 'rock balancing' yang berdiri di antara aliran gemericik air sungai.

Sementara yang gemar memancing, terdapat beberapa spot mancing dengan target utama



KR-M Nur Hasan

Menyusun batu di antara gemericik air.

ikan-ikan sungai seperti wader, kutuk/gabus, lele, dan sejenisnya. Bagi yang gemar selfie maupun wfe, tidak akan kekurangan objek dan latar belakang foto yang Instagramable.

Bosan bermain-main, wisatawan sudah dapat menikmati uadara segar dengan beristirahat di gazebo-gazebo maupun pendapa yang ada di kawasan ini. Masjid yang cukup representatif pun sudah tersedia di dekat areal parkir kendaraan. Sementara pada momentum tertentu, warga setempat menampilkan atraksi budaya seperti jathilan untuk

suguhan wisatawan.

Dari sejumlah sumber diperoleh keterangan, sejak awal di tempat ini sudah ada grojogan (air terjun) dengan batu-batu besar di kanan-kirinya. Entah sejak kapan dan bagaimana prosesnya batu-batu besar itu bertengger di situ. Namun karena dianggap sudah sangat lama, maka muncul istilah batu purba (purbo). Dari sinilah kemudian muncul nama Grojogan Watu Purbo yang bisa diartikan sebagai air terjun batu purba.

(M Nur Hasan)